

**FAKTOR-FAKTOR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN MELALUI
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSREMBANG)
DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA TAHUN 2014**

Oleh :

Juli Asnita

Dosen Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

Abstract

Infrastructure Development Environment is necessary for the community to support the life sustainability in the surrounding area. One of the tiered development program planning forum provided by the government to accommodate the aspirations of the community in terms of development is the Development Plan Council (Musrenbang). Musrenbang is a planning institutions in the region and as a mechanism to bridge the advance and necessity of the community (bottom up planning) with plan will be programmed by the government (top down planning). But through the process of development planning council in the district of Pekanbaru City, the results of the implementation of these activities is not in line with the expectations and advance of the society's which is the genuine conditions and needs. The advance from the Pekanbaru Kota district can not be accommodated by the City government. The purpose of this study was to determine the decision making factors of Environmental infrastructure Development through Musrenbang in the Pekanbaru Kota district in 2014.

The concept theory used to identify factors that exert influence is theory of decision making by Nigro and Nigro, which is: outside pressures, conservativeness, personality characteristics, influence from outside reference group, and other past conditioning. The research methodology used is descriptive analysis with qualitative approach. Method of data collection techniques in this study is observation, interview, and documentation by data analysis technique using Mies and Huberman model.

The research result showed that the decision making process of environmental infrastructure development through Musrenbang in Pekanbaru Kota district in 2014 is ineffective due to overlook on community interest , not able to solve the existing problem in Pekanbaru Kota district, and not in the underlying interests of the community

Keywords : Decision Making, Musrenbang, Environmental Infrastructure.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah, Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai alat penyelenggara Negara berkewajiban untuk mengembangkan pembangunan yang ada di daerahnya.

Salah satu indikator pembangunan daerah yang paling vital ialah bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada disekitarnya. Partisipasi disini tidak hanya dikaitkan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam berbagai bentuk rapat rencana pembangunan yang ada, melainkan dikaitkan juga dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam hal penyampaian aspirasi dan keluhan serta ikut mengawal kegiatan yang akan dilakukan dilingkungannya hingga turut serta mengawal proses pembangunan yang telah disepakati bersama. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, di perlukan suatu program yang dapat membantu pembangunan tersebut dengan suatu program. Adapun program perencanaan pembangunan yang ada didalam tatanan pemerintahan di Indonesia, mulai dari Pemerintah Daerah (Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi sampai pada Pemerintah Pusat yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk

mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Pemerintah Daerah mengamanahkan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif, yang terwujud dalam bentuk rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai Musrenbang Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi. Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun sistem perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini bisa terjadi manakala benar Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Musrenbang merupakan suatu mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan Kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah (kabupaten/Kota)

dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang Kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Hasil dari Musrenbang Kecamatan adalah Rencana Pembangunan Kecamatan.

Salah satu daerah yang patut dicermati terkait dengan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kota Pekanbaru adalah di Kecamatan Pekanbaru Kota. Ini di karenakan Kecamatan Pekanbaru Kota terletak di pusat Kota Pekanbaru yang menjadi cerminan dan gambaran pembangunan Kota Pekanbaru, sehingga perlu bagi kita untuk melihat pembangunan infrastruktur yang ada di

Kecamatan tersebut yang perencanaan pembangunannya dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam proses penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Pekanbaru Kota, hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan harapan dan Usulan masyarakat yang memang sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan. Usulan-usulan dari Kecamatan Pekanbaru Kota tidak dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan musrenbang, Kecamatan menentukan daftar kegiatan prioritas yang diperoleh dari daftar priotitas Musrenbang di tingkat kelurahan yang didasari usulan-usulan masyarakat ditingkat paling bawah yaitu RT/RW, kelurahan. Kemudian hasil tersebut akan di pilih kegiatan mana yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan oleh pihak kecamatan. Adapun daftar kegiatan prioritas kecamatan Pekanbaru kota yang telah di pilih berdasarkan usulan dari musrenbang tingkat kelurahan, yaitu :

Tabel 1

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2014

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi
1	Normalisasi Sungai Sago	Penanggulangan Banjir	Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Suka Ramai, Kelurahan Kota Baru
2	Normalisasi Sungai Limau	Penanggulangan Banjir	Kelurahan Kota Tinggi Dari Jl. Bintara s/d Jl. Gatot Subroto
3	Peninggian Jembatan Sungai Sago	-	Jl. M. Yamin
4	Pengaspalan Gg. Hidayah dan Gg.Sukma	Rehabilitasi	Kelurahan Sumahilang
5	Box Culver	Penanggulangan Banjir	Jl. Jendral Sudirman Kel. Sumahilang
6	Pembuatan Drainase	Penanggulangan Banjir	Jl. Wahid Hasyim Kel. Sumahilang
7	Box culver	Penanggulungan Banjir	Jl. Siberut dan Jl. Sersan Kel. Simapng Empat
8	Pembuatan Jembatan Diatas Parit		Jl. Rupal s/d Jl. Lingga Kel. Simpang Empat
9	Perbaiki Drainase	Penanggulangan Banjir	Jl. Ade Irma Suryani Gg. Syuhada Kel. Sumahilang

Sumber : Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2014

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran kegiatan yang menjadi prioritas di Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu mengenai penggulungan banjir, karena infrastruktur lingkungan seperti drainase dan saluran dilingkungan Kecamatan Pekanbaru Kota kurang memadai dalam menampung debit air yang cukup tinggi pada waktu musim penghujan tiba. Disamping itu, kebutuhan terhadap jalan lingkungan dan infrastruktur penghubung lalulintas yang memadai seperti jembatan juga diperlukan dalam menunjang kebutuhan masyarakat terhadap kelancaran transportasi dalam lingkungan.

Harapan masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota dari usulan yang mereka ajukan sampai ketinggian Kecamatan dapat terealisasi secara penuh atau mendekati jumlah dari daftar prioritas yang telah disepakati, mengingat prioritas kegiatan tersebut perlu tindakan yang cepat karena menyangkut tentang penggulungan banjir yang selalu datang pada saat musim penghujan tiba.

Berikut merupakan daftar pembangunan yang terealisasi di tahun 2015 di Kecamatan Pekanbaru Kota :

Tabel 2
Kegiatan Pembangunan Fisik di Kecamatan Pekanbaru Kota
Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah Anggaran
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
KECAMATAN PEKANBARU KOTA					
Pelebaran Jalan					
1	Pelebaran Jembatan HOS Cokroaminoto	1	Kegiatan	Rp. 800.000.000	Rp. 800.000.000
2	Pelebaran Jembatan Jl. M.Yamin	1	Kegiatan	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.500.000.000
Pedestrian					
1	Jl. Imam Bonjol (Kec. Pekanbaru Kota)	1	Kegiatan	Rp. 3.850.000000	Rp. 3.850.000000
2	Jl. H. Agussalim (Kec. Pekanbaru Kota)	1	Kegiatan	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.000.000.000
3	Jl. Kopi dan Jl. Cengkeh (Kec. Pekanbaru Kota)	1	Kegiatan	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.500.000.000
4	Jl. Sudirman (dgn Sukaramai) kec. Pekanbaru Kota	1	Kegiatan	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
Jaringan drainase					
1	Jl. Ade Irma Suryani Gg. Syuhada Kel. Sumahilang	500	M ²	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000.000
Jaringan Box Culvert					
1	Jl. Siberut dan Jl. Serasan Kel. Simpang Empat	1	Unit	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Total					Rp. 12.160.000.000

Dari data tersebut, maka dapat dilihat dari beberapa kegiatan prioritas kecamatan yang telah di ajukan, hanya terdapat tiga kegiatan prioritas di Kecamatan Pekanbaru Kota pada tahun 2014 yang terealisasi di tahun 2015. Yaitu kegiatan Peninggian Jembatan Sungai Sago di Jl. M. Yamin, Jaringan drainase Jl. Ade Irma Suryani Gg. Syuhada Kel. Sumahilang, dan Jaringan Box Culvert Jl. Siberut dan Jl. Serasan Kel. Simpang Empat.

Dari Tabel Kegiatan Pembangunan Fisik sekecamatan di Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 jika dibandingkan dengan kegiatan yang terealisasi di Kecamatan lainnya terdapat kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas Kecamatan Pekanbaru Kota namun terealisasi di tingkat Kota yaitu berupa kegiatan Pedestrian. Selanjutnya khusus di Kecamatan Pekanbaru Kota jika merujuk pada tabel diatas maka total kegiatan yang terealisasi di Kecamatan Pekanbaru Kota yang berdasarkan pada hasil Musrenbang Kecamatan Lebih sedikit terealisasi. Dari besaran dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik di Kecamatan Pekanbaru Kota pada tabel di atas terlihat bahwa di anggarkan sejumlah Rp. 12.160.000.000 untuk pembangunan fisik. Namun dari total dana tersebut lebih dari setengah anggaran yaitu sebesar Rp 9.350.000.000 Di pergunakan untuk pembangunan pedestrian dan pelebaran jalan yang tidak termasuk kedalam daftar prioritas kebutuhan Kecamatan dan bukan merupakan kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota. Padahal seperti yang di ketahui prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota lebih di dominasikan oleh kegiatan penanggulangan banjir mengingat

Kecamatan Pekanbaru Kota berada pusat Kota Pekanbaru yang minim akan daerah resapan. Namun dalam hal ini pemerintah lebih memperhatikan pembangunan di lingkungan perekonomian dan bisnis tanpa memperhatikan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur lingkungan yang ada pada masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota.

Jika dibandingkan dengan Kecamatan lain orientasi pembangunan di kecamatan Pekanbaru Kota lebih di dominasi oleh pembangunan pada sektor perekonomian dan bisnis yang tidak memberikan manfaat keuntungan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota karena dari yang terealisasi pembangunan di kecamatan Pekanbaru Kota lebih kepada pembangunan pedestrian. Sedangkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan lain yang terealisasi memang akan kebutuhan masyarakat yang lebih memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.

Wujud pembangunan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Pekanbaru Kota jika dikaitkan melalui pelaksanaan musrenbang Kecamatan tahun 2014, ditemukan beberapa fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan musrenbang di tingkat Kota yang tidak sepenuhnya mengacu pada kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan. Hal terlihat dari terealisasinya kegiatan yang bukan merupakan kebutuhan masyarakat setempat ataupun tidak termasuk ke dalam daftar prioritas Kecamatan.
2. Pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran karena perencanaan kebijakan tidak mengacu kebutuhan Kecamatan Pekanbaru Kota. Hal ini dapat dilihat dari

pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pekanbaru Kota lebih di dominasi pembangunan pedestrian dan pelebaran jalan di sekitar kawasan pasar Suka Ramai dan Ramayana. Kondisi ini ditengarai terjadi karena adanya pengaruh dari luar untuk lebih mempercepat pembangunan pelebaran jalan dan pedestrian di sekitar daerah tersebut karena kawasan tersebut merupakan pusat perekonomian Kota Pekanbaru. Akan tetapi dari sudut pandang lain justru mengabaikan kepentingan masyarakat tempatan tentang penggulungan banjir yang setiap tahun menjadi persoalan yang tak kunjung usai.

3. Pembangunan infrastruktur lingkungan yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat tempatan di Kecamatan Pekanbaru Kota secara kuantitas/jumlah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah usulan yang masuk dalam musrenbang Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2014 . karena pemerintah Kota Pekanbaru lebih mengutamakan infrastruktur baru yang memiliki dampak terhadap investasi modal sehingga menguntungkan secara ekonomi terhadap pelaku-pelaku usaha dan kas daerah melalui pajak retribusi dari pada pembangunan infrastruktur baru yan berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Faktor-faktor dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)**

di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2014”

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan Dengan informan Kasubbid permukiman dan tata ruang Bappeda kota Pekanbaru, Camat Pekanbaru Kota, LPM, dan Masyarakat sekita Kecamatan Pekanbaru Kota sesuai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2014, kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

HASIL

A. Faktor-Faktor dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2014

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan Pekanbaru kota, penulis menggunakan teori Nigro dan Nigro. Menurut Nigro dan Nigro terdapat lima faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. yaitu adanya tekanan dari

luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masalah.

Agar lebih jelas untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan Pekanbaru Kota, maka peneliti akan menjelaskan menggunakan indikator menurut Nigro dan Nigro. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar

Peran administrator dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari adanya pengaruh tekanan dari luar walaupun para administrator tetap harus mempertimbangkan *rational comprehensive* yang berarti para administrator harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang dipilih berdasarkan penilaian rasional. Akan tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan tetap tidak bisa dipisahkan dari dunia nyata sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Terkait dengan faktor-faktor pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2014, dalam hal ini daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan Pekanbaru Kota nantinya akan di musyawarahkan kembali ke tingkat kota untuk penentuan kegiatan yang terealisasi di kota melalui musyawarah. Penentuan kegiatan yang akan terealisasi di tingkat kota untuk tahun 2015 ini di tentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Pekanbaru. Pihak Bappeda memutuskan kegiatan yang dapat di realisasikan di tahun 2015. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh Bappeda tidak terlepas dari adanya

pengaruh tekanan dari luar. Bentuk pengaruh dari luar tersebut tergambar dari terdapatnya kegiatan yang terealisasi yang bukan merupakan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat yang ada di kecamatan Pekanbaru Kota yaitu merupakan kegiatan pedestrian untuk penataan kota.

Pemerintah kota dalam hal ini lebih memprioritaskan kegiatan penataan kota di bandingkan dengan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur lingkungan bagi masyarakat di kecamatan pekanbaru. Hal ini terlihat dari kegiatan yang terealisasi dari usulan yang di ajukan masyarakat kecamatan pekanbaru kota hanya sekitar 35% yang terealisasi di tingkat kota. padahal kebututuhan akan pembangunan infrastruktur lingkungan bagi masyarakat sangat di butuhkan. Karena ini merupakan hal yang tidak mungkin untuk sebuah kecamatan yang berada di tengah kota, namun kebutuhan akan infastruktur lingkungan bagi masyarakatnya di kecamatan itu sendiri terabaikan. Terlebih lagi pembangunan infrastruktur lingkungan ini untuk menunjang perekonomian bagi masyarakat yang ada di kecamatan pekanbaru kota.

Bentuk pengaruh tekanan dari luar dalam hal pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan pekanbaru kota juga di pengaruhi oleh program pemerintah yang tertuang dalam RPJMD kota Pekanbaru yang dimana dilimpahkan pada SKPD yang menangani pembangunan infrastruktur. Namun rencana pembangunan dari dinas terkait justru tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan tujuannya yang tidak tercapai. Seperti pelaksanaan kegiatan pedestrian, pemerintah dalam hal ini tidak memiliki ukuran yang jelas dalam pelaksanaannya. Kegiatan pedestrian di lakukan untuk menertibkan para PKL yang ada di kawasan tersebut. Namun pada kenyataannya tujuan

tersebut gagal dalam pelaksanaannya. karena masih terdapatnya pkl yang berjulan di kawasan pedestrian. Dengan tujuan dari pemerintah yang gagal ini, akan lebih baik jika pemerintah menangani permasalahan normalisasi sungai yang ada di sungai Sago karena usulan mengenai normalisasi sungai sago ini merupakan usulan yang selalu di usulkan masyarakat sekitar setiap tahunnya. Dengan begitu dana yang di keluarkan pemerintah jelas akan tujuan dan manfaatnya.

Dalam hal ini pihak kota membuat kebijakan dalam pengambilan keputusan lebih di dominasi oleh *Top Down Planning*. Padahal kebijakan maupun keputusan yang baik dan berhasil apa bila masyarakat di sekitar dapat merasakan hasil dari kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut kedalam sistem politik, pengupayan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah dan tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring, dan peninjauan kembali (umpan balik).

Terkait dengan pembangunan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Pekanbaru Kota pengambilan keputusan adalah keseluruhan proses yang menyangkut tentang pendefinisian masalah infrastruktur lingkungan yang didalamnya terkandung perumusan pemecahan masalah pembangunan infrastruktur lingkungan dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Pekanbaru Kota sampai pemberian legitimasi dari tindakan yang dipilih serta pengesahan dan pelaksanaan

pembangunan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Namun kenyataannya pengambilan keputusan yang di ambil oleh pihak kota dapat di katakan belum bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat di kecamatan Pekanbaru Kota. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat di kecamatan Pekanbaru kota masih belum bisa merasakan hasil dari kebijakan maupun keputusan tersebut. Hal ini terlihat dari dalam pelaksanaan musrenbang masih banyaknya usulan yang belum terealisasi dan infrastruktur lingkungan yang tidak memadai di lingkungan masyarakat. Dengan begitu, dapat di katakan bahwa sebuah kebijakan maupun keputusan apa bila terdapat tekanan dari luar tidak akan barjalan dan mencapai tujuan yang baik.

2. Adanya Pengaruh kebiasaan Lama

Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah *Sunk costs*) seperti kebiasaan investasi modal, sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun keputusan berkenaan telah dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus di ikuti apabila suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan. Kebiasaan lama sering diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya, apalagi para administrator baru ingin segera menduduki jabatan kariernya.

Terkait dengan faktor-faktor dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Pekanbaru kota, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pembangunan infrasturktur khususnya di

wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota lebih mengutamakan kepentingan investasi modal yang dapat memberikan *feed back/umpan balik* dalam bentuk penerimaan retribusi dari sektor dunia usaha dari pada pembangunan infrastruktur yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat tempatan di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota. Cerminan ini merupakan kebiasaan lama dari pemerintah Kota Pekanbaru sebagai salah satu Kota metropolitan yang mengedepankan pembangunan perekonomian makro.

Tekait dengan kebiasaan lama, pihak kota dalam merealisasikan kegiatan pembangunan pedestrian di kecamatan Pekanbaru Kota di karenakan adanya kepentingan ekonomi yang nantinya berdampak kepada pemasukan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pun retribusi melalui tempat usaha, retribusi parkir, retribusi sampah dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan tersebut akan memperkuat wajah kota Pekanbaru yang semakin berkembang dalam hal ini di sektor perekonomian.

Kebiasaan lama mempengaruhi pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan pekanbaru kota. hal ini di karenakan pemerintah lebih menata kawasan perkotaan dari pada pembangunan infrastruktur lingkungan bagi masyarakat sekitar. Pembangunan penataan kota dalam hal ini di lakukan oleh pihak kota untuk menata wajah kota pekanbaru agar menjadi sentral perekonomian yang dapat menjadi magnet bagi masyarakat dari daerah lain untuk berkunjung di kawasan perekonomian tersebut. Dan juga memberi kenyamanan untuk para pengunjung atau wisatawan berbelanja. Dengan begitu secara tidak langsung akan memberikan dampak atau *feed back* bagi daerah dengan pemasukan melalui retribusi.

3. Adanya pengaruh sifat pribadi

Menurut Nigro dan Nigro dalam Anggara (2012: 174) Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar.

Terkait dengan faktor-faktor pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan pekanbaru kota ini, dalam setiap musyawarah aspirasi dari tiap tiap elemen di kumpulkan dan kemudian di rembukkan lagi kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk di realisasikan. Pelaksanaan musrenbang di kecamatan pekanbaru kota di lakukan secara berjenjang yang di mulai dari tingkat RT/RW, Lurah, Kecamatan. pelaksanaan musrenbang di kecamatan pekanbaru Kota tidak ada di pengaruhi oleh sifat pribadi. Hal ini di karenakan pelaksanaan musrenbang di kecamatan pekanbaru kota dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan, hingga di tingkat Kota. Yang dimana usulan kegiatan yang telah terkumpul dari tingkat bawah akan di musyawahkan lagi ke tingkat selanjutnya untuk penentuan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

4. Adanya Pengaruh Kelompok Luar

Menurut Nigro dan Nigro dalam Anggara (2012: 174) Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan, seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang

dianggap dari luar dapat memuaskan. Pembuatan keputusan sering juga dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan.

Terkait dengan faktor-faktor pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan pekanbaru kota, pengaruh dari kelompok luar juga dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. hal ini mengingat dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat banyak *stake holder* termasuk para pelaku usaha atau pun kontraktor yang ikut andil dalam pelaksanaannya. dengan begitu aspirasi dari mereka juga dapat mempengaruhi pelaksanaan musrenbang. Selain dengan adanya peran para pelaku usaha atau kontaktor, pengaruh tuntutan politik juga berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur di kecamatan pekanbaru kota.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya, orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain karena khawatir wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan disalah gunakan.

Terkait dengan permasalahan faktor-faktor dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di kecamatan pekanbaru kota, adanya pengaruh kebiasaan masa lalu terletak pada kecemasan pemerintah kota dalam merealisasikan kegiatan yang di usulkan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kota telah mempunyai anggaran yang telah di tetapkan dan rencana

pembangunan untuk dalam jangka waktu 5 tahun ke depan yang harus terealisasi. Pihak kota mempertimbangkan usulan yang masuk untuk sesuai dengan anggaran dan lamanya waktu pengerjaan agar kegiatan yang di kerjakan tidak terbengkalai.

Pihak kota dalam hal ini merealisasikan kegiatan pedestrian di karenakan kegiatan pedestrian merupakan bagian dari RPJMD yang memang harus terlaksana. Sehingga kegiatan pembangunan pedestrian harus di dahulukan. Selain itu mengingat anggaran dalam pelaksanaannya pembangunan yang terbatas. Hal inilah yang membuat pihak kota lebih sedikit mengakomodir usulan dari masyarakat kecamatan Pekanbaru Kota dalam pembangunan infrastruktur lingkungannya.

KESIMPULAN

Dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di kecamatan Pekanbaru Kota tidak tepat sasaran hal ini dikarenakan pengambilan keputusan dalam merealisasikan kegiatan dari pelaksanaan musrenbang lebih mengabaikan usulan dari masyarakat di lingkungan kecamatan Pekanbaru Kota. Dimana usulan masyarakat yang banyak membutuhkan mengenai pembangunan infrastruktur lingkungan namun kegiatan dominan yang terealisasi adalah pembangunan pedestrian yang bukan merupakan usulan dari masyarakat di Kecamatan Pekanbaru Kota. Pembangunan infrastruktur oleh pihak kota dalam hal ini pedestrian tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota dan infrastruktur yang di bangun tidak sesuai dengan tujuan yang ingin di capai oleh pihak kota. Dimana tujuannya untuk menertibkan para PKL yang ada di kawasan tersebut dan menata Kota

Pekanbaru agar menjadi lebih tertata rapi, namun yang terjadi para PKL merasa terfasilitasi dengan di banggunya pedestrian tersebut masih berjualan di kawasan tersebut.

Pengambilan keputusan di pengaruhi adanya tekanan dari luar karena tidak didasari oleh kepentingan masyarakat. Keputusan yang diambil di pengaruhi oleh dinas-dinas terkait atau SKPD yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pembangunan di dominasi oleh kepentingan dinas-dinas terkait yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur. Dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di pengaruhi oleh kebiasaan lama dimana pemerintah kota lebih mengutamakan kepentingan investasi modal yang memiliki *Feedback*/umpan balik dalam bentuk retribusi dari sektor dunia usaha. Pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di kecamatan Pekanbaru Kota tidak ada di pengaruhi oleh sifat pribadi karena pelaksanaan musrenbang dilaksanakan secara berjenjang. Pengambilan keputusan adanya pengaruh Kelompok luar dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan Pekanbaru Kota di pengaruhi oleh politik dan keadaan masyarakat sekitar kecamatan Pekanbaru Kota. Sedangkan pengaruh keadaan masa lalu dalam pembangunan infrastruktur lingkungan di kecamatan pekanbaru Kota di pengaruhi oleh program pembangunan kota yang di susun dalam RPJMD.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Anggara, Sahya. 2012. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaava Media
- Moleong, Lexy J,2006. *Metoddologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Publik Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara
- Nugroho, Riant. 2012. *Publik Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi* . Bandung : Alfabeta
- Suyatna, Uyat. 2009. *Kebijakan Publik*. Bandung : Kencana Utama
- Wahab, Solihin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Wahab, Solihin Abdul. 2003. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan, Model – model Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

B. Dokumen

1. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
2. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
3. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan*
4. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara*

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. *Arsip pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014*

C. Sumber Elektronik

1. Efendi, Lutfy. 2009, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Nasabah pada Bank Muamalat Malang, Malang* (<http://lib.uin-malang.ac.id>, dikutip pada tanggal 20 Januari 2016, pukul 20:24PM)
2. Wijaya, Listercong. 2008, *Sinopsis Pedoman untuk Bappedadan Kecamatan Sebagai Lembaga Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten Murung Raya* (<http://www.kabmurungraya.go.id>, dikutip pada tanggal 20 Januari 2016, pukul 22:34PM)